

BAB III

ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA DALAM TAHAPAN PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON PERSERTA PEMILU TAHUN 2014

Sebelum penulis masuk kedalam inti dari pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran tentang bagaimana observasi yang dilakukan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Observasi ini dilakukan selama 8 kali, dari proses izin penelitian sampai akhirnya penelitian berupa wawancara dengan Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag, M.Si, Bapak Titok Haryanto, S.IP dan Bapak Nasrullah, S.H, S.Ag,.M.CL yang kesemua merupakan personalia KPU Kota Yogyakarta pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi. Berikut ini data yang bisa penulis sajikan :

Tabel 3.1

Tabel Observasi

Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Wawancara	Informan
30 Desember 2013	Memasukan surat izin ke bagian umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta		Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
4 Januari 2014	Memasukan surat izin ke Sekretariat KPU Kota Yogyakarta		Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bagian Umum
12 Januari 2014	Mengecek konfirmasi surat izin penelitian		Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bagian Umum
15 Januari 2014	Mengecek konfirmasi surat izin penelitian		Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bagian Umum

	dan baru mendapatkan konfirmasi		
Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Wawancara	Informan
18 Januari 2014	Meminta data berupa soft file hasil kegiatan verifikasi		Purbaningsih, S.H Ka Sub Bag Hukum
24 Januari 2014	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai peran kpu kota yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014.	Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag, M.Si. Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2013-2018 (Divisi Hukum dan Pengawasan)
19 Februari 2014	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai peran kpu kota yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014.	Bapak Titok Haryanto, S.IP mantan anggota KPU periode 2008-2013. (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas dan SDM)
4 Maret 2014	Melakukan Penelitian	Wawancara mengenai peran kpu kota yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014.	Bapak Nasrullah, S.H.,S.Ag.,M.CL Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Demikianlah gambaran observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian di Sekretariat KPU Kota Yogyakarta terkait dengan peran KPU

..... sebagai calon peserta

pemilu tahun 2014. Peneliti membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan penelitian dan mengumpulkan data guna mendapatkan data yang valid.

Kemudian dalam tahapan ini penulis akan mencoba memaparkan peran KPU Kota Yogyakarta, dalam tahapan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014. Peran KPU Kota Yogyakarta sangat penting sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam menentukan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, jujur dan adil tanpa adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam proses pelaksanaan pemilu di Kota Yogyakarta.

Tahapan proses verifikasi parpol calon peserta pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam P-KPU atau Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Bab II Peraturan KPU tersebut telah mengatur pasal-pasal tentang Persyaratan dan Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu yaitu pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan pasal 13. Selanjutnya di dalam Bab III Peraturan KPU tersebut juga mengatur pasal-pasal tentang Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu yaitu pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan pasal 23. Sedangkan di dalam Bab IV Peraturan KPU tersebut mengatur pasal-pasal tentang Penetapan Peserta Pemilu yaitu pasal 24, 25, 26, dan pasal 27.

Sedangkan untuk tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan

KPU Nomor 06 Tahun 2013 yang merupakan perubahan ke-empat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012.

A. Peran KPU Kota Yogyakarta Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

Terkait dengan peran KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu sedari awal komisioner KPU Kota Yogyakarta yang sekarang menjabat sebagai ketua KPU Kota Yogyakarta dan selaku narasumber dalam wawancara menegaskan bahwa tugas atau peran dari KPU Kota Yogyakarta adalah hanya sebagai tugas perbantuan atau membantu tugas KPU RI dalam melakukan verifikasi parpol ditingkat Kota Yogyakarta, karna sesungguhnya semua kegiatan ada disana di KPU RI sebagai penyelenggara pemilu secara nasional parpol mendaftar ke KPU RI. KPU Kota Yogyakarta hanya membantu melakukan verifikasi administrasi dan faktual berupa kepengurusan, terkait dengan kebenaran keberadaan ketua, sekretaris, dan bendahara, yang dibuktikan dengan kebenaran keterangan KTA dan KTP yang beralamat tinggal diwilayah Kota Yogyakarta, kemudian persentase 30% keterwakilan pengurus perempuan, serta keabsahan status kepemilikan kantor yang dijadikan sekretariat apakah kantor tersebut punya partai apa cuma pinjam saja, jika mandiri punya partai harus bisa dibuktikan dengan SK kepemilikan yang sah berupa surat akta notaries jika kantor tersebut hasil jual beli maupun sewa menyewa partai tersebut harus bisa menunjukkan kwitansi perjanjian jual beli maupun sewanya dan harus bisa

harus lebih dari masa pelaksanaan pemilu, dan yang terakhir jumlah dukungan keanggotaan juga dibuktikan dengan menunjukkan KTA dan KTP yang masih berlaku dan beralamat tinggal diwilayah Kota Yogyakarta.

Pada tahap awal pelaksanaan verifikasi parpol pada (8 Oktober) tahun 2012 di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta yang sudah terbentuk melakukan perencanaan pelaksanaan verifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu tahun 2014 dengan melakukan langkah-langkah yang sudah termasuk dalam tugas dan fungsi (tufoksi) selaku penanggungjawab pelaksanaan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu di tingkat Kota.

Dalam hal ini bentuk realisasi yang sudah tertuang dalam perencanaan pelaksanaan Verifikasi Parpol Sebagai Calon Peserta Pemilu dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Persiapan Verifikasi, Pelaksanaan Verifikasi, dan Hasil Verifikasi.

1. Tahapan Persiapan Verifikasi

Setelah KPU Kota Yogyakarta mendapatkan kiriman berkas-berkas dokumen persyaratan parpol menjadi peserta pemilu tahun 2014 dari KPU RI, khususnya berkas-berkas persyaratan parpol yang berada di daerah Kota Yogyakarta untuk kemudian dilakukan pengecekan kembali kebenaran faktualnya di lapangan oleh KPU Kota Yogyakarta. Karena sebagaimana peran KPU Kota dalam tahapan verifikasi ini adalah sebagai tugas perbantuan dari tugas KPU RI dalam melakukan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 di wilayah Kota Yogyakarta,

persentase 30% keterwakilan pengurus perempuan, keanggotaan parpol, dan keterangan kepemilikan kesekretariatan atau kantor parpol. Yang kesemuanya dilakukan verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan berkas-berkas data yang ada yang diperoleh dari KPU RI.

Melihat kembali kebelakang (*flase back*) ketika masa pendaftaran dibuka, ada 46 Parpol yang mendaftarkan partainya ke KPU RI di Jakarta. Setelah KPU RI melihat kelengkapan persyaratan terdapat 34 partai yang dinyatakan lolos tahapan selanjutnya, yaitu tahap administrasi. Kemudian, setelah KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi partai-partai tersebut, terdapat 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, yang selanjutnya akan menjalani verifikasi faktual. Namun, dilandasi oleh gugatan beberapa parpol, dalam prosesnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan kepada KPU RI untuk meloloskan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikut sertakan kedalam verifikasi faktual, sehingga KPU RI menyertakan ke 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi tersebut ke dalam tahapan verifikasi faktual.²²

a. Pembentukan Kelompok Kerja

Guna memperlancar kelangsungan kerja KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi, maka berdasarkan keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012 tentang pembentukan kelompok kerja verifikasi faktual parpol peserta pemilu

²²Haryanto Titok. Bulletin Flamma, edisi judul *Prosedur dan Problem Representasi Parpol*. IRE Yogyakarta. 2013. Hal 1.

tahun 2014 di Kota Yogyakarta tertanggal 1 Oktober 2012 yang Memutuskan sebagai berikut :

1. Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta dengan Susunan Kelompok Kerja yang terdiri dari: 5 (lima) orang Pengarah, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 21 (dua puluh satu) orang Anggota. Kesemua komposisi kelompok kerja ini adalah terdiri dari komisioner KPU Kota, personalia kesekretariatan KPU Kota, serta staf-staf dari bidang-bidang kerja yang ada di KPU Kota dalam hal ini berarti KPU Kota tidak melibatkan pihak lain diluar dari KPU Kota Yogyakarta.
2. Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diatas bertugas mengadakan rapat koordinasi internal mengenai: 1) Pembagian kelompok kerja menjadi 5 (lima) tim, 2) Pembagian wilayah verifikasi, 3) Teknis pelaksanaan verifikasi faktual.
 1. Pembagian Kelompok Kerja Menjadi 5 (lima) Tim.
 - a. Tim 1 (satu) terdiri dari Wawan Budiyanto, Sag (Anggota KPU Kota Yogyakarta, dan selaku ketua tim 1), Warisna Wijaya, S.IP (sekertaris tim) dengan anggota: Agus Sutarto, S.IP, Drs. Bambang Sutadi, dan Sukamto. Bertugas melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol Di: Partai

(PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012.

- b. Tim 2 (dua) terdiri dari Sunaji, SSi, MSi. (Anggota KPU Kota Yogyakarta, dan selaku ketua tim 2), Indradi Yohananto, S.H (sekertaris tim) dengan anggota: Didik Sutrianto, S.IP, Sukarjilah, dan Ruli Febrianto JS, A.Md. Bertugas melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol Di: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012.
- c. Tim 3 (tiga) terdiri dari Aan Kurniasih, S.H (Anggota KPU Kota Yogyakarta, dan selaku ketua tim 3), Purbaningsih, S.H (sekertaris tim) dengan anggota: Imam Zubaidi, S.H, Juwairiyah, S.IP, dan Setyawan Isharyadi. Bertugas melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol Di: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan Partai Hanura. Yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012.
- d. Tim 4 (empat) terdiri dari Titok Haryanto, S.IP (Anggota KPU Kota Yogyakarta, dan selaku ketua tim 4), Yurnelis Piliang, S.IP, M.PA (sekertaris tim), dengan anggota: Wisnu Dani

melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol Di: Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra), Partai NasDem, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012.

- e. Tim 5 (lima) terdiri dari Nasrullah, S.H SAg. MCL (Ketua KPU Kota Yogyakarta, dan selaku ketua tim 5), Drs. Wisnu Budi Irianto, M.Si (sekertaris tim), dengan anggota: Yuyud Futrama, S.E, Anggrawati Juwita, Sm Hk, dan Mukidah Suharini, A.Md. Bertugas melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol Di: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012.

2. Pembagian Wilayah Verifikasi.

- a. Kelompok 1 (satu) melakukan verifikasi di Wilayah Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Margangsari, dan Kecamatan Kraton.
- b. Kelompok 2 (dua) melakukan verifikasi di Wilayah Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Pakualaman.
- c. Kelompok 3 (tiga) melakukan verifikasi di Wilayah Kecamatan ... dan Kecamatan Jatis...

- d. Kelompok 4 (empat) melakukan verifikasi di Wilayah Kecamatan Gondokusuman, dan Kecamatan Danurejan.
 - e. Kelompok 5 (lima) melakukan verifikasi di Wilayah Kecamatan Umbulhardjo, dan Kecamatan Kotagede.
3. Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual.
 - a. Melaksanakan pengundian sampel Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan di verifikasi;
 - b. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol;
 - c. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap domisili kantor ditingkat Kota dan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan verifikasi administrasi semua pengurus Parpol ditingkat Kota dan Kecamatan terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi Parpol.
 3. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diatas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta;
 4. Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diatas diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan, dengan besaran honor per/bulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta, selanjutnya.

5. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 Tahun 2012.

Dalam melaksanakan verifikasi faktual, tim verifikasi dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang masing-masing bertanggungjawab terhadap parpol dan wilayah kecamatan yang mereka datangi. Adapun pembagian kelompok adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pembagian kelompok berdasarkan partai dan kecamatan

K E L.	NAMA	N O.	PARTAI	N O.	KECAMA TAN
I	Wawan Budiyanto, S.Ag	1	Partai Golkar	1	Mantrijeron
	Warisna Wijaya, S.IP	2	Partai Persatuan Pembangunan	2	Mergangsan
	Agus Sutarto, S.IP	3	Partai Bulan Bintang	3	Kraton
	Drs. Bambang Sutadi	4	Partai Kedaulatan		
	Sukamto	5	Partai karya Republik		
		6	Partai Kebangkitan Nasional Ulama		
II	Sunaji, SSi, MSi	7	Partai Demokrat	4	Gondomanan
	Indradi Yohananto, SH	8	Partai Keadilan Sejahtera	5	Ngampilan
	Didik Sutrianto,	9	Partai Kebangkitan	6	Wirobrajan

	SIP		Bangsa		
	Sukarjilah	10	Partai Demokrasi Pembaruan	7	Pakualama n
	Ruli Febrianto Jaelani S, AMd	11	Partai Nasional Republik		
		12	Partai Damai Sejahtera		
		13	Partai Bhinneka Indonesia		
III	Aan Kurniasih, SH	14	Partai Amanat Nasional	8	Tegalrejo
	Purbaningsih, SH	15	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	9	Gedongten gen
	Imam Zubaidi, SH	16	Partai Hanura	10	Jetis
	Juwairiyah	17	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme		
	Setyawan Isharyadi	18	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia		
		19	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia		
IV	Titok Haryanto, SIP	20	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	Gondokusu man
	Yurnelis Piling, SIP, MPA	21	Partai NasDem	12	Danurejan
	Wisnu Dani Kusumo, SH	22	Partai Peduli Rakyat Nasional		
	Joko Purnama	23	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia		
	Putri Nastiti, Amd	24	Partai Serikat Rakyat Independen		
		25	Partai Penegak		

			Demokrasi Indonesia		
V	Nasrullah, SH, Sag, MCL	26	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	13	Umbulharjo
	Drs. Wisnu Budi Irianto, MSi	27	Partai Persatuan nasional	14	Kotagede
	Yuyud Futrama, SE	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
	Anggrawati Juwita, SmHk	29	Partai Demokrasi kebangsaan		
	Mukidah Suharini	30	Partai Buruh		
		31	Partai Kongres		

Sumber :Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

b. Pembuatan Jadwal Kegiatan Verifikasi

Pembuatan jadwal ataupun penyusunan jadwal tahapan verifikasi yang akan dilaksanakan, bertujuan untuk mempermudah langkah kerja KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan tahapan-tahapan yang akan dikerjakan nantinya. Tentunya perancangan jadwal tahapan verifikasi yang akan dibuat ini berkaitan dengan penjadwalan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Adapun penjadwalan kegiatan verifikasi yang telah tersusun adalah sebagai berikut :

Jadwal Pelaksanaan :

1) Parpol yang lolos verifikasi administrasi :

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Vertual kepengurusan dan domosili kantor	1-3 November 2012
2.	Vertual keanggotaan tahap I	6-12 November 2012

3.	Menghadirkan pengurus Parpol	21 November 2012
4.	Menghadirkan Anggota	22-24 November 2012
5.	Penyampaian hasil Vertual	26 November 2012
6.	Masa Perbaikan	27 November – 3 Desember 2012
7.	Pengambilan sampel tahap II	4 Desember 2012
8.	Vertual keanggotaan tahap II	6-11 Desember 2012
9.	Pemanggilan pengurus dan anggota Parpol	15-17 Desember 2012
10	Rapat Pleno Terbuka	19 Desember 2012

2) Parpol pasca Keputusan DKPP :

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Vertual kepengurusan dan domisili kantor	5-9 Desember 2012
2.	Vertual keanggotaan tahap I	5-11 Desember 2012
3.	Menghadirkan pengurus Parpol	10-11 Desember 2012
4.	Menghadirkan Anggota	10-11 Desember 2012
5.	Penyampaian Hasil Verifikasi	12 Desember 2012

3) Jadwal verifikasi faktual kepengurusan dan kantor Parpol calon peserta Pemilu 2014.

No	Hari dan Tanggal	PARTAI	KEL.
1	Kamis, 1	Partai Golongan Karya	I

	November 2012	Partai Demokrat	II
		Partai Amanat Nasional	III
		Partai Gerakan Indonesia Raya	IV
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	V
2	Jumat, 2 November 2012	Partai Persatuan Pembangunan	I
		Partai Keadilan Sejahtera	II
		Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	III
		Partai NasDem	IV
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	V
3	Sabtu, 3 November 2012	Partai Bulan Bintang	I
		Partai Kebangkitan Bangsa	II
		Partai Demokrasi Pembaruan	
		Partai Hanura	III
		Partai Peduli Rakyat Nasional	IV
		Partai Persatuan Nasional	V

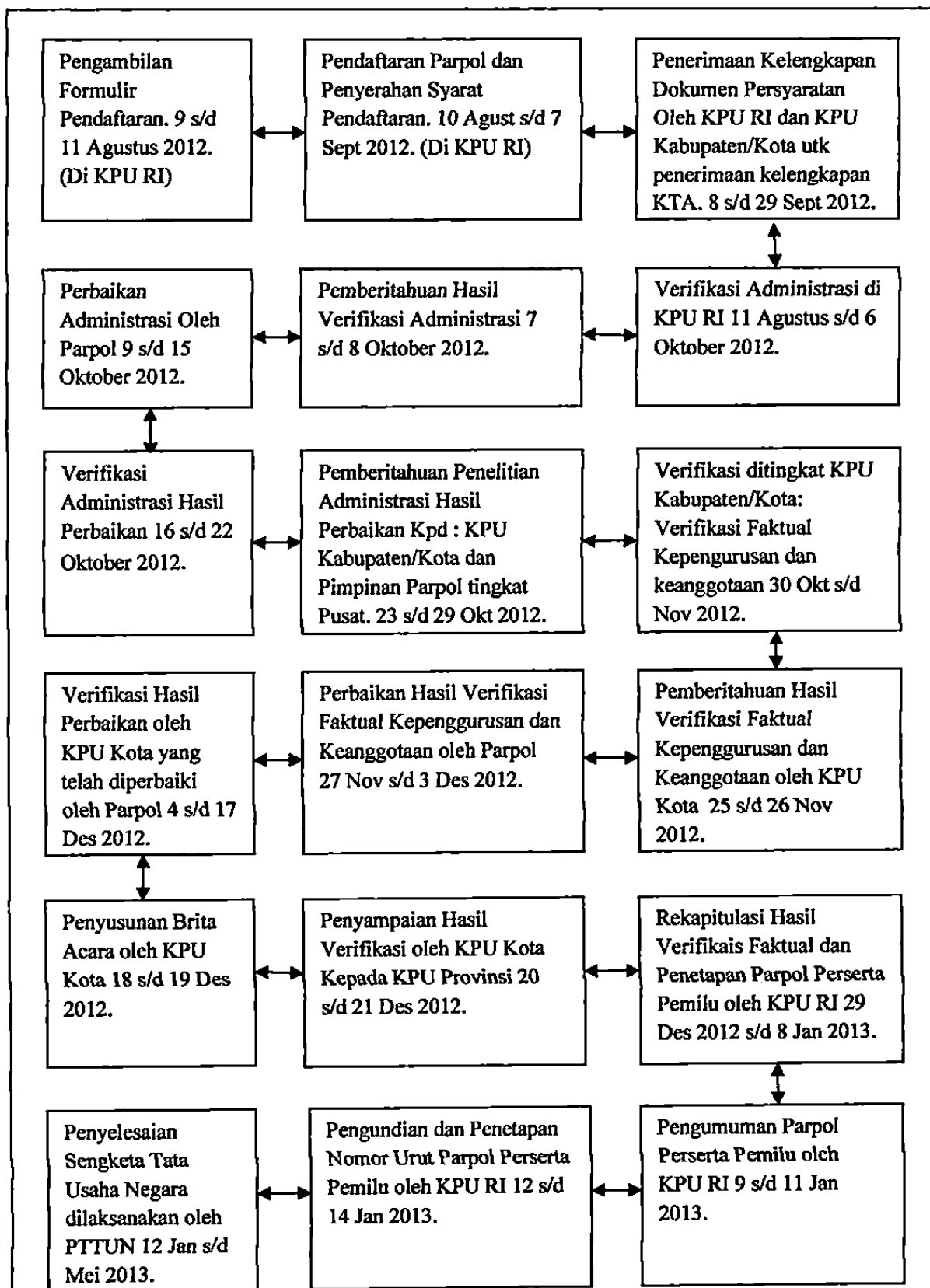
Sumber : Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

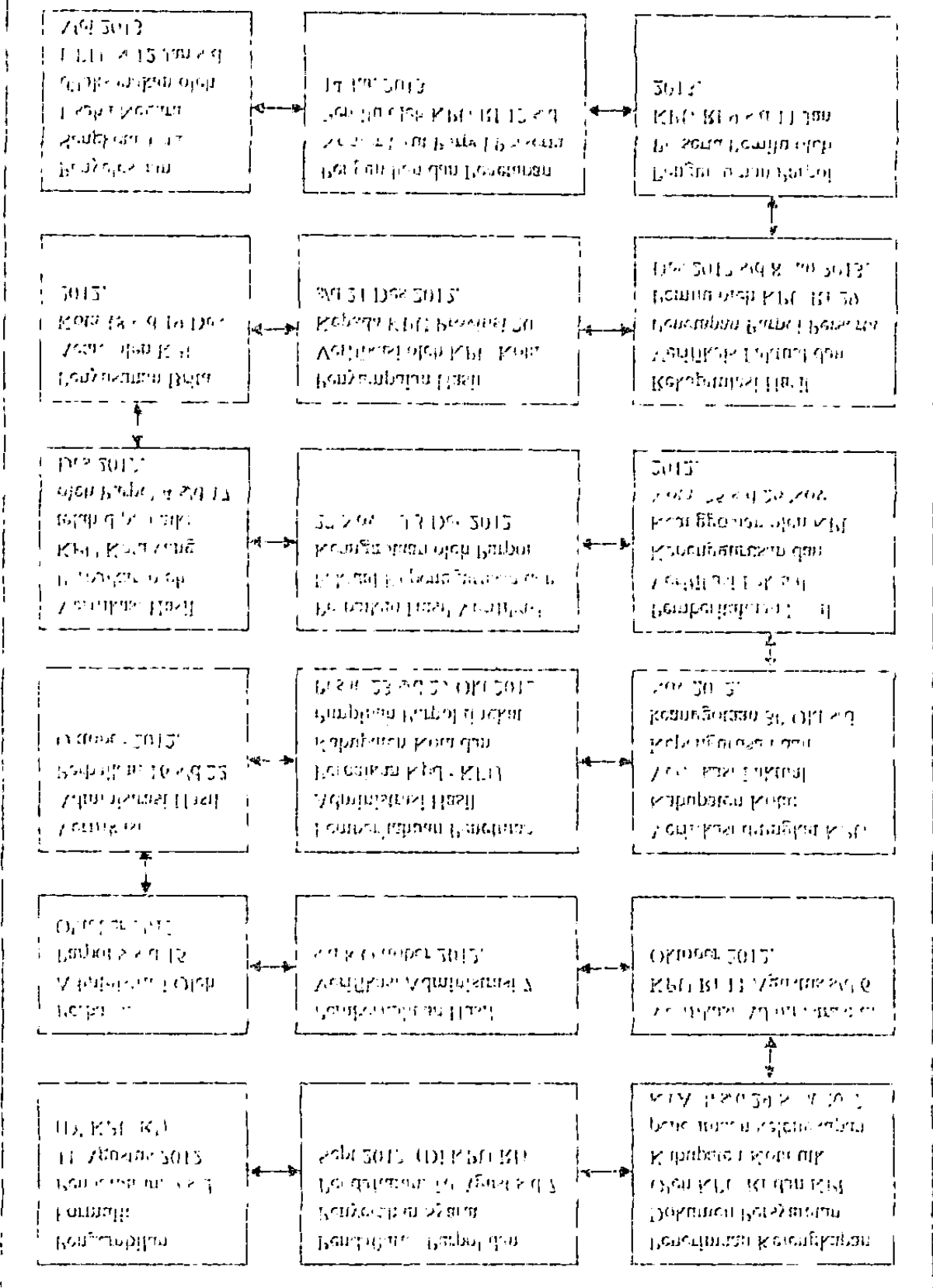
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Proses verifikasi dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus 2012 dengan tahapan program/kegiatan pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran di kantor KPU RI sampai tahap akhir verifikasi yaitu pengundian dan penetapan nomor urut parpol 12 s/d 14 Januari 2013 serta penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh PTTUN dari tanggal 12 Januari s/d 13 Mei 2013 terkait penyelesaian sengketa yang terjadi dalam tahapan verifikasi, sehingga dapat

... verifikasi dilaksanakan selama 6 bulan

BAGAN 2.2

MEKANISME PROSES VERIFIKASI PARPOL





ՄԱՐԿԱՆՆԱԿԱՆ ԲՈՑՈՐԵՐ ԱՆՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՑՈՐԵՐ

ԿՐԿ 14.25

Setelah menyelesaikan tahap persiapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu terkait dengan pembentukan kelompok kerja dan penjadwalan pelaksanaan verifikasi. KPU Kota Yogyakarta memulai tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan verifikasi, baik pelaksanaan verifikasi administrasi maupun faktual. Untuk pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua KPU Kota Yogyakarta bapak Wawan Budiyanto, Sag. Peran atau tugas KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual parpol sebagai calon peserta pemilu adalah hanya sebagai tugas perbantuan dari tugas KPU RI, semua kegiatan ada di KPU RI, parpol mendaftarkan partainya disana kami (KPU Kota) hanya membantu verifikasi persyaratan administrasi dan faktual berupa perkantoran parpol yang ada di Kota Yogyakarta, termasuk keberadaan pengurus, keterwakilan perempuan, dukungan keanggotaan dan syarat-syarat administrasi dan faktual lainnya yang berkaitan dengan persyaratan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu.²³

Verifikasi Administrasi dan Faktual

Verifikasi merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, verifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu 2014 dilakukan secara administrasi dan faktual, adapun tujuan dari tahapan verifikasi Parpol ini adalah untuk menjaring partai-partai yang tidak mempunyai kelengkapan persyaratan yang sah untuk mengikuti Pemilu.

²³ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta pada 24 Januari 2014.

1. Verifikasi Administrasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (16) Verifikasi Administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat parpol menjadi peserta pemilu.²⁴

Kebenaran bukti-bukti tertulis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (16) verifikasi administratif adalah data-data berupa daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, hardcopy dan fotocopy kartu tanda anggota (KTA) yang kesemuanya kemudian dilakukan pencocokkan data sesuai atau tidak sesuai, dan proses mencocokkan data daftar nama anggota parpol ini dilaksanakan di kantor KPU Kota Yogyakarta dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2012. Khusus tentang keanggotaan, karena jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 406.010 orang, maka setiap parpol di Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya harus memiliki anggota sebanyak 406 orang.

Setelah KPU Kota Yogyakarta selesai melakukan pengecekan atau pencocokan data daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, hardcopy dan fotocopy KTA, tahapan selanjutnya KPU Kota Yogyakarta melakukan pemberitahuan hasil verifikasi administrasi daftar nama-nama anggota parpol kepada seluruh parpol yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, dan hasil dari pencocokan data ini direkap dalam sebuah lampiran berita acara yang kemudian disampaikan kepada seluruh parpol

²⁴ Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol peserta

secara serentak pada tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor KPU Kota Yogyakarta dalam sebuah rapat pleno terbuka, bagi parpol yang belum bisa memenuhi syarat minimal dukungan keanggotaan, bisa memperbaiki datanya dan menyerahkan kembali ke KPU Kota paling lambat tanggal 9 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2012.

Kemudian, hasil perbaikan data dukungan minimal anggota parpol akan di verifikasi administrasi kembali pada tanggal 16 sampai dengan 22 Oktober 2012, dan akan diberitahukan kembali penelitian administrasi hasil perbaikan kepada parpol yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme yang sama, yaitu melalui rapat pleno terbuka di kantor sekretariat KPU Kota Yogyakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari parpol untuk mendengarkan hasil akhir dari penelitian administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, dan pemberitahuan hasil perbaikan verifikasi administrasi tahap 2 (dua) ini dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Oktober 2012.

Berikut ini daftar nama-nama partai yang akan dilakukan pencocokan data administrasi di kota Yogyakarta:

Tabel : 3.2

Daftar nama-nama partai yang akan dilakukan pencocokan data administrasi

NO	NAMA PARTAI
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
13.	Partai Kedaulatan
14.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16.	Partai Persatuan Nasional (PPN)
17.	Partai Buruh
18.	Partai Damai Sejahtera (PDS)
19.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
20.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
21.	Partai Kongres
22.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
23.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
24.	Partai Nasional Republik (Nasrep)

25.	Partai Pengusaha dan Perkerja Indonesia (PPPI)
26.	Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan diatas, mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi Peran KPU Kota Yogyakarta dalam verifikasi administrasi ini hanya mencocokkan dokumen-dokumen berkas persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu tahun 2014 yang telah mendaftar ke KPU RI, kemudian dari KPU RI dokumen-dokumen tersebut dikirim lagi ke KPU Kota Yogyakarta untuk dilakukan pencocokkan daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, hardcopy, dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Berikut ini pada tabel di bawah menggambarkan proses verifikasi administrasi di Kota Yogyakarta, berdasarkan verifikasi administrasi pencocokkan data parpol pada tahap kedua.

Tabel 3.3

1) Verifikasi Administrasi Partai Nasdem.

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	2095 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	2094 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	2039 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	2047 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak	48 anggota

	sesuai dengan daftar hardcopy	
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	2024 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	71 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil verifikasi administrasi Partai Nasdem diatas, dapat dilihat bahwa Partai Nasdem memenuhi persyaratan keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 2.095 daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 2.024 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA, sementara yang tidak sesuai ada 71 nama dan alamat anggota.

Tabel 3.4

2) Verifikasi Administrasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	726 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	751 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	756 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	659 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	67 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	646 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	80 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari keterangan tabel diatas, verifikasi administrasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 726 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 646 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA, hanya 80 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.5

3) Verifikasi Administrasi Partai Grindra

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	613 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	602 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	602 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	601 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	12 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	601 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	12 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Grindra sudah mampu memenuhi syarat keanggotan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 613 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 601 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Hanya 12 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.6

4) Verifikasi Administrasi Partai PKNU

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	590 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	606 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	578 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	590 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	542 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	48 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil verifikasi administrasi partai PKNU diatas dapat disimpulkan bahwa partai PKNU memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 590 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang dikumpulkan, sebanyak 542 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA, Sedangkan 48 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.7

5) Verifikasi Administrasi Partai Demokrat

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	1503 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	1455 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	1504 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	1430 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	73 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	1490 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	13 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil tabel verifikasi administrasi diatas, dapat dilihat bahwa persyaratan keanggotaan Partai Demokrat memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 1.503 jumlah nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, sebanyak 1.490 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotocopy KTA, hanya 13 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotocopy KTA.

Tabel 3.8

6) Verifikasi Administrasi Partai Damai Sejahtera (PDS)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	0 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	0 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	0 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil tabel verifikasi administrasi diatas, dapat dilihat bahwa persyaratan keanggotaan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak memenuhi persyaratan keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di kota yogyakarta, dikarenakan dari data yang dikumpulkan tidak ada data dalam jumlah angka yang dapat menjadi tolak ukur persyaratan administrasi.

Tabel 3.9

7) Verifikasi Administrasi Partai Keadilan Sejahtera

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	500 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	518 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	518 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	490 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak	10 anggota

	sesuai dengan daftar hardcopy	
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	490 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	10 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	28 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil tabel verifikasi administrasi diatas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenuhi persyaratan keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 500 daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang dikumpulkan, 490 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA, sementara yang tidak sesuai ada 10 nama dan alamat anggota.

Tabel 3.10

8) Verifikasi Administrasi Partai Kongres

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	192 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	192 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	14 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	192 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol	0 anggota

	dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	192 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU kota Yogyakarta

Dari keterangan data tabel verifikasi administrasi diatas, dapat dilihat bahwa persyaratan keanggotaan Partai Kongres tidak memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan di wilayah Kota Yogyakarta. Dari 192 jumlah nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, sebanyak 0 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotocopy KTA, dan sebanyak 192 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotocopy KTA.

Tabel 3.11

9) Verifikasi Administrasi Partai Persatuan Nasional (PPN)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	449 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	448 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	448 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	448 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	1 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol	439 anggota

	dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	10 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari gambaran tabel hasil verifikasi administrasi diatas, dapat dilihat bahwa persyaratan keanggotaan Partai Persatuan Nasional (PPN) memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan di wilayah Kota Yogyakarta. Dari 449 jumlah nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, sebanyak 439 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotocopy KTA, hanya 10 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotocopy KTA.

Tabel 3.12

10) Verifikasi Administrasi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	412 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	436 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	436 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	97 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	315 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	97 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	315 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	339 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 412 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, hanya 97 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 315 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.13

11) Verifikasi Administrasi Partai Buruh

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	1006 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	700 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	701 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	1 anggota

5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	1005 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	1 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	1005 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	699 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil tabel verifikasi administrasi diatas, dapat dilihat bahwa persyaratan keanggotaan Partai Buruh tidak memenuhi 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan di wilayah Kota Yogyakarta. Dari 1.006 jumlah nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, hanya 1 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotocopy KTA, sedangkan 1.005 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotocopy KTA.

Tabel 3.14

**12) Verifikasi Administrasi Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura)**

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	867 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	450 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	450 anggota

4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	10 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	857 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	9 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	858 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	420 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	20 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil verifikasi administrasi Partai Hanura diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memenuhi 406 anggota yang menjadi syarat keanggotaan parpol untuk daerah Kota Yogyakarta. Dari 867 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang dikumpulkan, sebanyak 420 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA, Sedangkan 20 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.15

13) Verifikasi Administrasi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam	788 anggota

2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	788 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	481 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	788 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	86 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	702 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) tidak memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 788 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, hanya 86 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 702 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.16

14) Verifikasi Administrasi Partai Golongan Karya (Golkar)

NO	DATA	JUMLAH
----	------	--------

1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	1504 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	1350 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	1332 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	932 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	418 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	808 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	524 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	313 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	105 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Golongan Karya (Golkar) memenuhi syarat keanggotan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 1.504 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 808 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 524 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.17

15) Verifikasi Administrasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

NO	DATA	JUMLAH
----	------	--------

1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	0 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	469 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	7 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	7 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	462 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 469 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang ada, sebanyak 7 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 462 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy

Tabel 3.18

16) Verifikasi Administrasi Partai Demokrasi Kebangsaan

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	101 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	0 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	33 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	101 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	24 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	77 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak memenuhi syarat keanggotan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotan parpol di Kota Yogyakarta.

Dari 101 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, hanya 24 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 77 nama dan alamat anggota parpol

Tabel 3.19

17) Verifikasi Administrasi Partai Persatuan Pembangunan

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	582 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	582 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	566 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	556 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	26 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	529 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	53 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 582 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 529 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Hanya 53 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.20

18) Verifikasi Administrasi Partai Amanat Nasional

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	6020 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	906 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	1441 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	6020 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	6020 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	496 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	410 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Amanat Nasional (PAN) memenuhi syarat keanggotan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 6.020 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 496 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy

... 410 nama anggota parpol

dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.21

19) Verifikasi Administrasi Partai Bulan Bintang (PBB)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	480 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	596 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	659 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	257 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	223 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	253 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	227 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	298 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	41 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 480 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 298

softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 41 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.22

20) Verifikasi Administrasi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	0 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	457 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	420 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	411 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	46 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) memenuhi syarat keanggotan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotan parpol di

yang ada, sebanyak 411 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA. Sedang 46 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.23

21) Verifikasi Administrasi Partai Nasional Republik (PNR)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	438 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	438 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	435 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	438 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	434 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	4 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Nasional Republik (Nasrep) memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota

438 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 434 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Hanya 4 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.24

22) Verifikasi Administrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	594 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	457 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	457 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	447 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	147 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	444 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	150 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenuhi syarat keanggotaan

Yogyakarta. Dari 594 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 444 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Hanya 150 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.25

**23) Verifikasi Administrasi Partai Serikat Rakyat
Indenpenden (SRI)**

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	408 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	444 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	444 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	166 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	242 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	166 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	242 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	278 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Serikat Rakyat Indenpenden (SRI) tidak memenuhi syarat keanggotaan 406

Dari 408 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, hanya 166 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 242 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.26

24) Verifikasi Administrasi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	498 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	458 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	408 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	407 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	51 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memenuhi syarat keanggotaan 406

Dari 498 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 407 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam bentuk softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 51 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam bentuk softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.27

25) Verifikasi Administrasi Partai Kedaulatan

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	0 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	416 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	413 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	413 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	3 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai Kedaulatan memenuhi syarat keanggotaan 406 anggota yang menjadi

anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang ada, sebanyak 413 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam bentuk softcopy namun sesuai dengan fotokopi KTA. Sedangkan 3 nama anggota parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam bentuk softcopy namun tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

Tabel 3.28

**26) Verifikasi Administrasi Partai Nasional Benteng
Kerakyatan Indonesia (PNBKI)**

NO	DATA	JUMLAH
1.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy	551 anggota
2.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy	0 anggota
3.	Fotokopi KTA yang diterima	0 anggota
4.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan daftar hardcopy	0 anggota
5.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy	551 anggota
6.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA	0 anggota
7.	Daftar nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA	551 anggota
8.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun sesuai dengan KTA	0 anggota
9.	Daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang tidak ada dalam softcopy namun tidak sesuai dengan KTA	0 anggota

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil verifikasi administrasi Partai

11. Hasil Verifikasi Administrasi Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) tidak memenuhi syarat

keanggotaan 406 anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta. Dari 551 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang ada, sebanyak 551 nama anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan daftar hardcopy. Sedangkan 551 nama dan alamat anggota parpol dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA.

2. Verifikasi Faktual

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (17) Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilu.²⁵

a) Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud diadakan verifikasi adalah melaksanakan verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu 2014, meliputi pengurus, persentasi perwakilan perempuan, kepemilikan kantor, dan keanggotaan Parpol.
- 2) Tujuannya adalah untuk mencocokkan data yang diterima dari Parpol dengan kondisi faktual yang ada, meliputi pengurus,

perwakilan perempuan, kepemilikan kantor, dan

- a. Parpol calon peserta pemilu yang diverifikasi oleh KPU Kota Yogyakarta adalah parpol yang lolos verifikasi administrasi.

Tabel : 3.2.1

Partai-partai yang lolos verifikasi administrasi

No	Parpol yang Lolos Verifikasi Administrasi
1.	Partai NasDem
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)
7.	Partai Golongan Karya (Golkar)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12.	Partai Demokrat
13.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15.	Partai Persatuan Nasional (PPN)
16.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Sumber: KPU Kota Yogyakarta

- b. Parpol Pasca Putusan DKPP :

Berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

November 2012, KPU diwajibkan melaksanakan verifikasi faktual kepada 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Namun demikian KPU Kota Yogyakarta hanya menerima dokumen 15 parpol dari KPU RI, sehingga yang diverifikasi faktual oleh KPU Kota Yogyakarta adalah :

Tabel : 3.2.2
Pарpol Pasca Putusan DKPP

No	Pарpol Pasca Putusan DKPP
1.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2.	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
3.	Partai Kongres
4.	Partai Serikat Rakyat indenpenden (SRI)
5.	Partai Karya Republik (Pakar)
6.	Partai Nasional Republik (Nasrep)
7.	Partai Buruh
8.	Partai Damai Sejahtera (PDS)
9.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
10.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
12.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
13.	Partai Kedaulatan
14.	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
15.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Sumber: Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

- c. Sebelum verifikasi faktual keanggotaan, terlebih dahulu dilaksanakan Pengambilan atau Pencuplikan Sampel Keanggotaan

tersebut pertama kali dilaksanakan secara serentak oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Oktober 2012 di Hotel Somaya dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi DIY.

- d. Pemberitahuan kepada pengurus parpol mengenai waktu pelaksanaan verifikasi faktual khususnya kepengurusan dan domisili kantor.

1) Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol.

Dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik (Parpol). Dalam UU tersebut juga diatur bahwa parpol peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara tidak diwajibkan mendaftar, atau secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Sedangkan bagi parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau parpol baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan.

Namun setelah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK), merespon gugatan oleh sejumlah kelompok masyarakat, akhirnya diputuskan semua parpol baik yang sudah memenuhi ambang batas perolehan suara dalam pemilu terakhir

memenuhi persyaratan seperti yang termuat dalam ayat (2) pasal 8 UU Nomor 8 tahun 2012. Dari data yang ada di Kota Yogyakarta menunjukkan, dari 34 parpol yang mendaftar ke KPU RI di Jakarta, hanya 27 parpol yang memiliki struktur kepengurusan dan memasukan dokumen persyaratan ke KPU Kota Yogyakarta.

Khusus tentang keanggotaan, karena jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 406.010 orang, maka setiap parpol di Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya harus memiliki anggota sebanyak 406 orang. Namun dalam melakukan verifikasi faktual, KPU tidak memverifikasi semua daftar anggota yang dimasukan parpol ke KPU Kota Yogyakarta. Dari jumlah anggota yang dimasukkan, KPU hanya mengambil sampel sebanyak 10 persen dari daftar anggota yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem *random*. Menggunakan nalar dan rujukan perundangan, agar partai dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Kota Yogyakarta, setidaknya harus ada 41 orang anggota parpol yang ketika didatangi oleh KPU mereka harus menyatakan benar sebagai anggota partai yang memasukan namanya sebagai anggota.²⁶

Berikut ini pada tabel di bawah menggambarkan proses verifikasi keanggotaan partai politik di Kota Yogyakarta, berdasar verifikasi faktual keanggotaan pada tahap pertama maupun pada tahap kedua.

Tabel 3.2.3
Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

No.	Nama Partai	Tahap 1				Tahap 2			
		Populasi	Sample	MS	TMS	Populasi	Sample	MS	TMS
1	Partai Amanat Nasional	496	50	45	5	-	-	-	-
2	Partai Bulan Bintang	551	56	28	28	572	58	46	12
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444	45	42	3	-	-	-	-
4	Partai Demokrasi Pembaruan	0	0	0	0	1,098	110	43	67
5	Partai Demokrat	1,490	149	45	62	-	-	-	-
6	Partai Gerindra	601	60	43	15	-	-	-	-
7	Partai Golongan Karya	808	81	45	14	-	-	-	-
8	Partai Hati Nurani Rakyat	420	42	20	22	459	46	42	4
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	646	65	3	62	758	76	43	33
10	Partai Keadilan Sejahtera	490	49	42	4	-	-	-	-
11	Partai Kebangkitan Bangsa	7	0	0	0	410	41	16	25
12	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	481	49	4	45	470	47	29	18
13	Partai Nasdem	2,024	203	42	58	-	-	-	-
14	Partai Peduli Rakyat Nasional	436	44	9	35	463	47	4	43
15	Partai Persatuan Nasional	439	44	13	31	500	50	42	8
16	Partai Persatuan Pembangunan	529	53	42	9	-	-	-	-
17	Partai Buruh	687	69	4	65	-	-	-	-
18	Partai Damai Sejahtera	0	0	0	0	497	50	2	48
19	Partai Demokrasi Kebangsaan	33	0	0	0	0	0	0	0

20	Partai Karya Republik	0	0	0	0	463	47	6	41
21	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	578	58	25	33	867	87	42	45
22	Partai Kedaulatan	413	42	4	38	414	42	11	31
23	Partai Kongres	14	0	0	0	20	0	0	0
24	PNI Marhenisme	413	42	2	40	-	-	-	-
25	Partai Nasional Republik	436	44	6	38	512	52	16	36
26	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	402	0	0	0	435	44	27	17
27	Partai Serikat Rakyat Independen	439	44	2	42	617	62	13	49

Sumber: KPU Kota Yogyakarta, 2013

Dari hasil tabel verifikasi faktual keanggotaan parpol diatas, dapat penulis uraikan sedikit keterangan mengenai hasil dari verifikasi faktual keanggotaan parpol baik yang telah memenuhi persyaratan pada tahap pertama maupun tahap kedua. Adapun keterangan mengenai hasil dari verifikasi faktual keanggotaan parpol di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama dengan jumlah populasi sebanyak 496 anggota, jumlah sampel yang diambil 50 anggota, jumlah sesuai 45 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 5 anggota.
2. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi

jumlah sesuai 28 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 28 anggota. Baru pada tahap kedua (2) Partai Bulan Bintang (PBB) bisa memenuhi syarat (ms) keanggotaan parpol pada saat verifikasi faktual dengan jumlah populasi sebanyak 572 anggota, jumlah sampel yang diambil 58 anggota, jumlah yang sesuai 46 anggota, dan yang tidak sesuai ada 12 anggota.

3. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama dengan jumlah populasi sebanyak 444 anggota, jumlah sampel yang diambil 45 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 3 anggota.
4. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 0 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Baru pada tahap yang kedua (2) memenuhi syarat (ms) dengan jumlah populasi sebanyak 1.098 anggota, jumlah sampel yang diambil 110 anggota, jumlah sesuai 43 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 67 anggota.
5. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrat memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 1.490

anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 62 anggota dan yang tidak diperiksa 42 anggota.

6. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 601 anggota, jumlah sampel yang diambil 60 anggota, jumlah sesuai 43 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 15 anggota dan yang tidak diperiksa 3 anggota.

7. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Golongan Karya (Golkar) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 808 anggota, jumlah sampel yang diambil 81 anggota, jumlah sesuai 45 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 14 anggota dan yang tidak diperiksa 22 anggota.

8. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama dengan jumlah populasi sebanyak 420 anggota, jumlah sampel yang diambil 42 anggota, jumlah sesuai 20 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 22 anggota. Baru pada tahap yang kedua (2) memenuhi syarat (ms) dengan jumlah populasi sebanyak 459 anggota, jumlah sampel yang diambil 46 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 4 anggota.

9. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

jumlah populasi sebanyak 646 anggota, jumlah sampel yang diambil 65 anggota, jumlah sesuai 3 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 62 anggota. Baru pada tahap yang kedua (2) memenuhi syarat (ms) dengan jumlah populasi sebanyak 758 anggota, jumlah sampel yang diambil 76 anggota, jumlah sesuai 43 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 33 anggota.

10. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 490 anggota, jumlah sampel yang diambil 49 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 4 anggota dan yang tidak diperiksa 3 anggota.

11. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 7 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 410 anggota, jumlah sampel yang diambil 41 anggota, jumlah sesuai 16 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 25 anggota.

12. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1)

diambil 49 anggota, jumlah sesuai 4 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 45 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 470 anggota, jumlah sampel yang diambil 47 anggota, jumlah sesuai 29 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 18 anggota.

13. Verifikasi faktual keanggotaan Partai NasDem memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 2.024 anggota, jumlah sampel yang diambil 203 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 58 anggota dan yang tidak diperiksa 103 anggota.

14. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 436 anggota, jumlah sampel yang diambil 44 anggota, jumlah sesuai 9 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 35 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 463 anggota, jumlah sampel yang diambil 47 anggota, jumlah sesuai 4 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 43 anggota.

15. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Persatuan Nasional (PPN) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 439 anggota, jumlah sampel yang diambil 44 anggota,

jumlah yang tidak sesuai ada 21 anggota

Baru pada tahap yang kedua (2) memenuhi syarat (ms) dengan jumlah populasi sebanyak 500 anggota, jumlah sampel yang diambil 50 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 8 anggota.

16. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenuhi syarat (ms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 529 anggota, jumlah sampel yang diambil 53 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 9 anggota dan yang tidak diperiksa 2 anggota.

17. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Buruh (PB) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 687 anggota, jumlah sampel yang diambil 69 anggota, jumlah sesuai 4 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 65 anggota.

18. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 0 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 497 anggota, jumlah sampel yang diambil 50

jumlah yang tidak sesuai ada 40

19. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 33 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 4 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota.

20. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Karya Republik (PKR) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 0 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 463 anggota, jumlah sampel yang diambil 47 anggota, jumlah sesuai 6 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 41 anggota.

21. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 578 anggota, jumlah sampel yang diambil 58 anggota, jumlah sesuai 25 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 33 anggota. Baru pada tahap yang kedua (2) memenuhi syarat (ms) dengan jumlah populasi sebanyak 867 anggota, jumlah sampel yang diambil 87 anggota, jumlah sesuai 42 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 45 anggota.

22. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Kedaulatan (PK) tidak memenuhi

413 anggota, jumlah sampel yang diambil 42 anggota, jumlah sesuai 4 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 38 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 414 anggota, jumlah sampel yang diambil 42 anggota, jumlah sesuai 11 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 31 anggota.

23. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Kongres (PK) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 14 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 20 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota.

24. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 413 anggota, jumlah sampel yang diambil 42 anggota, jumlah sesuai 2 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 40 anggota.

25. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Nasional Republik (PNR) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 436 anggota, jumlah sampel yang diambil 44 anggota, jumlah sesuai 6 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 38 anggota.

jumlah populasi sebanyak 512 anggota, jumlah sampel yang diambil 52 anggota, jumlah sesuai 16 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 36 anggota.

26. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 402 anggota, jumlah sampel yang diambil 0 anggota, jumlah sesuai 0 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 0 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 435 anggota, jumlah sampel yang diambil 44 anggota, jumlah sesuai 27 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 17 anggota.

27. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Serikat Rakyat Indenpenden (PSRI) tidak memenuhi syarat (tms) pada tahap pertama (1) dengan jumlah populasi sebanyak 439 anggota, jumlah sampel yang diambil 44 anggota, jumlah sesuai 2 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 42 anggota. Pada tahap yang kedua (2) juga tidak memenuhi syarat (tms) dengan jumlah populasi sebanyak 617 anggota, jumlah sampel yang diambil 62 anggota, jumlah sesuai 13 anggota, jumlah yang tidak sesuai ada 49 anggota.

2) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Domisili Kantor Parpol.

Terkait dengan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan

turun kelapangan dilakukan secara dor to dor (satu persatu) bertemu dengan pengurusnya langsung, dan ketika ditemui dan ditanya harus bisa menunjukkan KTP dan KTA sebagai anggota partai tersebut, dan waktu ditemui harus ditanyakan jika mengatakan sebagai anggota partai yang bersangkutan tidak masalah, namun jika mengatakan tidak maka yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan yang mengatakan saya bukan anggota partai tersebut.

Tahapan verifikasi faktual dilapangan yang pertama ialah terkait dengan kepengurusan, kepengurusan harus difaktual berkaitan dengan ketua, sekretaris, bendahara, itu harus ada orangnya dan harus bisa menunjukkan KTP dan KTA jika bisa menunjukkan itu berarti ada orangnya, kemudian KPU Kota Yogyakarta menghitung keterwakilan 30% lebih atau kurang, kalau kurang dibuat surat pernyataan tidak bisa memenuhi keterwakilan 30% perempuan di kabuapten/kota. Kemudian kepengurusannya berkaitan dengan SK kepengurusan, selanjutnya status kantor parpol yang bersangkutan itu apa beli, hibah, pinjam, sewa atau bagaimana, jika sewa harus bisa menunjukkan bukti sewanya dengan kwitansi perjanjian sewa menyewa, masa sewanya harus melebihi waktu pelaksanaan pemilu minimal sampai selsai pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres sekitar bulan September atau Oktober tahun 2014. Kalau itu apa parpol tidak bisa memenuhi maka

dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat keanggotaan dan domisili kantor.²⁷

KPU Kota Yogyakarta telah melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol tahap I pada tanggal 1 s/d 24 November 2012. Berikut ini pada tabel dibawah ini menggambarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

²⁷ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Sag. Di Sekretariat KPU Kota Yogyakarta 24 Januari 2014.

VERIFIKASI FAKTUAL

PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NO.	PARTAI	Nama-nama dalam susunan pengurus DPC	Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC	Domisili kantor tetap DPC	Bukti kepemilikan kantor tetap DPC	Hasil verifikasi keanggotaan
1	Partai Golongan Karya	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	memenuhi
2	Partai Persatuan Pembangunan	Sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	memenuhi
3	Partai Bulan Bintang	Sesuai	sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak memenuhi
4	Partai Demokrat	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	memenuhi
5	Partai Keadilan Sejahtera	tidak sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	memenuhi
6	Partai Kebangkitan Bangsa	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
7	Partai Demokrasi Pembaruan	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
8	Partai Amanat Nasional	Sesuai	tidak sesuai	sesuai	sesuai	memenuhi
9	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Sesuai	sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
10	Partai Hanura	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	tidak memenuhi
11	Partai NasDem	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	memenuhi
12	Partai Peduli Rakyat Nasional	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
13	Partai Gerakan Indonesia Raya	tidak sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	memenuhi
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
15	Partai Persatuan Nasional	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	tidak

						memenuhi
16	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	memenuhi

Dari hasil tabel verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol Kota Yogyakarta, dapat penulis jelaskan bahwa hasil verifikasi keanggotaan adalah sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya (Golkar)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Golkar berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*sesuai*) selanjutnya Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*) dan juga Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*sesuai*), sedangkan hasil verifikasi keanggotaan Partai Golkar (*memenuhi*).

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*) selanjutnya Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*) sedangkan Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (*memenuhi*).

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC

DPC juga (*sesuai*), selanjutnya Domisili kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), sedangkan Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Bulan Bintang (*tidak memenuhi*).

4. Partai Demokrat

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Demokrat berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), selanjutnya Domisili kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), sedangkan Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Demokrat (*memenuhi*).

5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), hanya Domisili kantor tetap DPC yang (*sesuai*), sedangkan Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Demokrat (*memenuhi*).

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kebangkitan

pengurus DPC (*tidak sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (*tidak memenuhi*).

7. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Demokrasi Pembaruan (*tidak memenuhi*).

8. Partai Amanat Nasional (PAN)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Amanat Nasional (*memenuhi*).

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*sesuai*), Domisili kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (*tidak memenuhi*).

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Hanura (*tidak memenuhi*).

11. Partai NasDem

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Hati NasDem berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Hanura (*memenuhi*).

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional (*tidak memenuhi*).

13. Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) akan tetapi Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC juga (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya (*memenuhi*).

14. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), serta Bukti kepemilikan kantor

... DPC ... sehingga hasil verifikasi

keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (*tidak memenuhi*).

15. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Persatuan Nasional (PPN) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC juga (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), akan tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Persatuan Nasional (*tidak memenuhi*).

16. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*sesuai*), untuk Domisili kantor tetap DPC juga (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*memenuhi*).

Berikutnya KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 5 s/d 11 Desember 2012 telah selesai melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol sebagaimana yang diperintahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

VERIFIKASI FAKTUAL

PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NO.	PARTAI	Nama-nama dalam susunan pengurus DPC	Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC	Domisili kantor tetap DPC	Bukti kepemilikan kantor tetap DPC	Hasil verifikasi keanggotaan
1	P. Kedaulatan	tidak sesuai	tidak sesuai	sesuai	sesuai	tidak memenuhi
2	P. kebangkitan Nasional Ulama	Sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
3	P. Karya Republik	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
4	P. Nasional Republik	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
5	P. Damai Sejahtera	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
6	P. Bhinneka Indonesia	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
7	PNI Marhaenisme	Sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
8	P. Kesatuan Demokrasi Indonesia	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
9	P. Nasional Benteng Kerakyatan Indo.	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
10	P. Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
11	P. Serikat Rakyat Independen	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi

12	P. Penegak Demokrasi Indonesia	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
13	P. Buruh	tidak sesuai	tidak sesuai	sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
14	P. Kongres	sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi
15	P. Demokrasi Kebangsaan	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak memenuhi

Dari hasil tabel verifikasi faktual pengurus dan anggota parpol pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mewajibkan KPU untuk menyertakan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi ke dalam verifikasi faktual, dengan demikian KPU Kota Yogyakarta juga wajib melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun hasil dari verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Partai Kedaulatan

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kedaulatan berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*sesuai*), tetapi hasil verifikasi keanggotaan Partai Kedaulatan (*tidak memenuhi*).

2. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) kemudian Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*), Domisili kantor

... DPC ... Bukti kepemilikan kantor tetap DPC

(sesuai), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Kebangkitan Nasional Ulama *(tidak memenuhi)*.

3. Partai Karya Republik (PKR)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Karya Republik (PKR) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC *(tidak sesuai)* Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga *(tidak sesuai)*, kemudian Domisili kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Karya Republik *(tidak memenuhi)*.

4. Partai Nasional Republik (PNR)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Nasional Republik (PNR) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC *(tidak sesuai)* Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga *(tidak sesuai)*, kemudian Domisili kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Nasional Republik *(tidak memenuhi)*.

5. Partai Damai Sejahtera (PDS)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC *(tidak sesuai)* Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC

(tidak sesuai), kemudian Domisili kantor tetap DPC juga

(tidak sesuai), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Damai Sejahtera *(tidak memenuhi)*.

6. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Bhinneka Indonesia (PBI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC *(tidak sesuai)* Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga *(tidak sesuai)*, kemudian Domisili kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Bhinneka Indonesia *(tidak memenuhi)*.

7. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC *(sesuai)* tetapi untuk Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC *(tidak sesuai)*, kemudian Domisili kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga *(tidak sesuai)*, sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme *(tidak memenuhi)*

8. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kesatuan

susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), kemudian Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (*tidak memenuhi*).

9. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), kemudian Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (*tidak memenuhi*).

10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) tetapi Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*), kemudian Domisili kantor tetap DPC (*sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (*tidak memenuhi*).

11. Partai Serikat Rakyat Indenpenden (PSRI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Serikat Rakyat Indenpenden (PSRI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), kemudian Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Serikat Rakyat Indenpenden (*tidak memenuhi*).

12. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga (*tidak sesuai*), kemudian Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (*tidak memenuhi*).

13. Partai Buruh

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Buruh berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC juga
... Domisili kantor tetap DPC (*sosuai*)

Bukti kepemilikan kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Buruh (*tidak memenuhi*).

14. Partai Kongres

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Kongres berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC (*tidak sesuai*), kemudian Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Kongres (*tidak memenuhi*).

15. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

Verifikasi faktual pengurus dan anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) berdasarkan Nama-nama dalam susunan pengurus DPC (*tidak sesuai*) Keterwakilan Perempuan pada pengurus DPC (*tidak sesuai*), Domisili kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), kemudian Bukti kepemilikan kantor tetap DPC juga (*tidak sesuai*), sehingga hasil verifikasi keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (*tidak memenuhi*).

3. Tahap Akhir Hasil Verifikasi

a. Rekapitulasi Keputusan Akhir Hasil Verifikasi

Berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi pengurus dan anggota Parpol tingkat Kota

Sembilan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas. KPU Kota Yogyakarta telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota Parpol tingkat Kota Yogyakarta dengan hasil sebagaimana Formulir Lampiran 6 Model F8-Parpol *terlampir* adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI : FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KOTA YOGYAKARTA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA PARTAI	PENGURUS						PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN		KEPEMILIKAN KANTOR		KEANGGOTAAN			KESIMPULAN	
		KETUA		SEKERTARIS		BENDAHARA		TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI		TAHA P II
		TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II									
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	496 50 45 5 450	- - - - -	Memenuhi Syarat	
2	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	551 56 28 28 280	572 58 46 12 460	Memenuhi Syarat	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi	444 45 42 3	- - - -	Memenuhi Syarat	

												syarat Hasil proyeksi	420	-	
4	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	- - - - -	1,098 110 43 67 430	Memenuhi Syarat
5	Partai Demokrat	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	1.490 149 45 104 450	- - - - -	Memenuhi Syarat
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra)	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	601 60 43 17 430	- - - - -	Memenuhi Syarat
7	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi	808 81 45 36	- - - -	Memenuhi Syarat

												syarat Hasil proyeksi	450	-	
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	420 42 20 22 200	459 46 42 4 420	Memenuhi Syarat
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	646 65 3 62 30	758 76 43 33 430	Memenuhi Syarat
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	490 49 42 7 420	- - - - -	Memenuhi Syarat
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat	7 - - - -	410 41 16 25	Tidak Memenuhi Syarat

												Hasil proyeksi	-	160	
12	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	481 49 4 45 40	470 47 29 18 290	Tidak Memenuhi Syarat
13	Partai Nasdem	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	2.024 203 42 161 420	- - - - -	Memenuhi Syarat
14	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	436 44 9 35 90	463 47 4 43 40	Tidak Memenuhi Syarat
15	Partai Persatuan Nasional (PPI)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	439 44 13 31 130	500 50 42 8 420	Memenuhi Syarat

16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi	529	-	Memenuhi Syarat
												Jumlah sampel	53	-	
												Hasil verifikasi :			
												Memenuhi syarat	42	-	
												Tdk memenuhi syarat	11	-	
												Hasil proyeksi	420	-	

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI : FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KOTA YOGYAKARTA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA PARTAI	PENGURUS						PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN		KEPEMILIKAN KANTOR		KEANGGOTAAN			KESIMPULAN	
		KETUA		SEKERTARIS		BENDAHARA		TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI		TAHA P II
		TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II	TAHA PI	TAHA P II									
1	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	0	-	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	0	-		
												Hasil verifikasi : Memenuhi syarat	0	-		
												Tdk memenuhi syarat	0	-		
												Hasil proyeksi	0	-		
2	Partai Buruh	Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	687	-	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	69	-		
												Hasil verifikasi : Memenuhi syarat	4	-		
												Tdk memenuhi syarat	65	-		
												Hasil proyeksi	40	-		
3	Partai Damai Sejahtera (PDS)	Sesuai	-	Sesuai	-	Tidak Sesuai	Sesuai	0	33%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi	0	497	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	0	50		
												Hasil verifikasi : Memenuhi syarat	0	2		
												Tdk memenuhi	0	48		

												syarat Hasil proyeksi	0	20	
4	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	33	-	Tidak Memenuhi Syarat
												Jumlah sampel	0	-	
												Hasil verifikasi :			
												Memenuhi syarat	0	-	
												Tdk memenuhi syarat	0	-	
												Hasil proyeksi	0	-	
5	Partai Karya Republik (Pakar)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	0	33%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi	0	463	Tidak Memenuhi Syarat
												Jumlah sampel	0	47	
												Hasil verifikasi :			
												Memenuhi syarat	0	6	
												Tdk memenuhi syarat	0	41	
												Hasil proyeksi	0	60	
6	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	0	30%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi	578	867	Memenuhi Syarat
												Jumlah sampel	58	87	
												Hasil verifikasi :			
												Memenuhi syarat	25	42	
												Tdk memenuhi syarat	33	45	
												Hasil proyeksi	250	420	
7	Partai Kedaulatan	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	0	100%	Sesuai	-	Jumlah populasi	413	414	Tidak Memenuhi Syarat
												Jumlah sampel	42	42	
												Hasil verifikasi :			
												Memenuhi syarat	4	11	
												Tdk memenuhi syarat	38	31	

												Hasil proyeksi		-40	110	
8	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	0	-	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	0	-		
												Hasil verifikasi :				
												Memenuhi syarat	0	-		
												Tdk memenuhi syarat	0	-		
												Hasil proyeksi	0	-		
9	Partai Kogres	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Jumlah populasi	14	20	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	0	0		
												Hasil verifikasi :				
												Memenuhi syarat	0	0		
												Tdk memenuhi syarat	0	0		
												Hasil proyeksi	0	0		
10	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKl)	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	0	-	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	0	-		
												Hasil verifikasi :				
												Memenuhi syarat	0	-		
												Tdk memenuhi syarat	0	-		
												Hasil proyeksi	0	-		
11	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	22%	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi	413	-	Tidak Memenuhi Syarat	
												Jumlah sampel	42	-		
												Hasil verifikasi :				
												Memenuhi syarat	2	-		
												Tdk memenuhi syarat	40	-		
												Hasil proyeksi	20	-		

12	Partai Nasional Republik (Nasrep)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	0	33%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	436 44 6 38 60	512 52 16 36 160	Tidak Memenuhi Syarat
13	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	Tidak Sesuai	-	0	-	Tidak Sesuai	-	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	0 0 0 0 0	- - - - -	Tidak Memenuhi Syarat
14	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-	0	33%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	402 0 0 0 0	435 44 27 17 270	Tidak Memenuhi Syarat
15	Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI)	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	0	33%	Tidak Sesuai	Sesuai	Jumlah populasi Jumlah sampel Hasil verifikasi : Memenuhi syarat Tdk memenuhi syarat Hasil proyeksi	439 44 2 42 20	617 62 13 49 130	Tidak Memenuhi Syarat

b. Temuan-temuan KPU Kota Yogyakarta pada saat verifikasi

Dari verifikasi faktual di Kota Yogyakarta, nampak adanya jarak yang demikian lebar antara partai dengan masyarakat. Flamma (2013) edisi berjudul *Membenahi Partai Politik* memberikan suguhan tentang kisah verifikasi parpol di Kota Yogyakarta. Dari sana tergambar betapa beberapa parpol cenderung melakukan manipulasi dukungan atau daftar keanggotaan yang mereka masukkan ke KPU Kota Yogyakarta. Bahkan terkesan, beberapa partai politik berupaya menghalalkan segala cara agar mereka bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Complain dan kemarahan dari masyarakat kepada petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual adalah peristiwa yang hampir setiap hari terjadi selama masa verifikasi berlangsung. Alasannya karena ada masyarakat yang merasa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik namun namanya masuk dalam daftar anggota partai politik. Bahkan diantara mereka ada yang mendesak petugas dari KPU untuk menjelaskan kenapa namanya bisa masuk ke dalam daftar anggota parpol. Dalam kondisi demikian, petugas dari KPU tentu tidak bisa menjelaskan asal mula mengapa nama seseorang masuk dalam daftar anggota partai, karena daftar nama anggota partai disusun oleh partai dan bukan oleh KPU. Ada beberapa modus yang dipakai partai politik sehingga masyarakat sendiri tidak tahu namanya masuk dalam daftar nama anggota partai.²⁸

Pertama, ada parpol yang daftar nama anggotanya merupakan nama-nama anggota yang disusun oleh pengurus lama. Para pengurus baru tidak melakukan perbaikan daftar nama anggota sehingga mereka tidak tahu ada anggotanya yang sudah menjadi pengurus partai lain.

Kedua, ada partai yang daftar nama anggotanya sekedar mengambil dari daftar pemilih pemilu sebelumnya atau mengambil nama yang entah dari mana. Itulah bagian manipulasi nyata dalam pendataan. Faktanya, ketika nama-nama anggota yang masuk dalam sampel didatangi oleh petugas KPU ditemukan adanya nama yang sudah meninggal dunia, nama yang sudah pindah alamat, orang yang bekerja sebagai PNS, bahkan nama-nama yang fiktif. Pengertian nama fiktif di sini adalah ditemukan alamatnya, namun pemilik rumah mengatakan tidak pernah ada orang dengan nama tersebut tinggal di alamat tersebut. Ketika ditanyakan pada pengurus RT/RW, merekapun tidak pernah mendengar nama tersebut di lingkungan RT/RW-nya.

Ketiga, ada parpol yang mengumpulkan KTP warga melalui forum-forum pengajian. Modus semacam ini dipakai tanpa adanya penjelasan kepada masyarakat mengapa mereka harus mengumpulkan KTP kepada pengurus RT/RW atau kepada tuan rumah yang menggelar pengajian. Sebagian besar masyarakat yang menjadi korban modus semacam ini adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat rata-rata tidak sadar pola

... ..

Keempat, ada parpol yang menggunakan modus berkirim surat kepada orang-orang yang namanya dimasukan sebagai anggota partai. Isi surat yang dikirimkan adalah ajakan untuk mengaku sebagai anggota partai ketika nanti didatangi oleh petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual dan *iming-iming* asuransi kematian dengan nilai nominal tertentu.

Lebih parah lagi, dalam verifikasi faktual ada partai politik yang menggunakan praktek perjokian. Ketika petugas dari KPU tidak bisa menemui anggota partai politik, prosedur formalnya adalah meminta partai politik untuk menghadirkan anggota yang tidak bisa ditemui ke kantor KPU Kota Yogyakarta. Pada masa inilah praktek perjokian banyak terjadi. Diantara mereka yang didatangkan ke kantor KPU Kota Yogyakarta oleh partai politik banyak yang tidak bisa menyebutkan alamat tempat tinggalnya sendiri, dan bahkan ada nama anggota yang sudah meninggal ikut hadir ke kantor KPU Kota Yogyakarta.

Kemudian terkait dengan ditemukannya nama anggota yang diklaim oleh 2 (dua) partai yang berbeda salah satu mantan anggota komisioner KPU Kota Yogyakarta yang juga merupakan ketua tim verifikasi di wilayah Kecamatan Gondokusuman dan Danurejan mengatakan bahwa, diwilayah yang iya datangi dalam melakukan verifikasi dukungan keanggotaan waktu itu ada ditemukannya dukungan ganda atau diklaim oleh oleh 2 (dua) partai yang berbeda pada saat diwawancarai beliau mengatakan kalau tidak keliru partai yang mengklaim adalah partai Hanura dan partai PBB terhadap seorang ibuk-

... kemudian petugas verifikasi di

daerah tersebut mendatangi alamat ibu tersebut dan menanyakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota dari partai yang mana, karna ibu tersebut memilih salah satu dari partai tersebut maka yang bersangkutan diminta menandatangani surat pernyataan bukan salah satu anggota dari partai tersebut yang telah disediakan oleh petugas verifikasi dan namanya yang tertera di partai lain kemudian dicoret.

Karna beberapa kali mendapati nama anggota parpol yang ganda keberadaannya dipartai lain, narasumber wawancara yang juga selaku ketua tim verifikasi pada saat itu sangakat menyayangkan kejadian seperti ini yang dinilainya terkesan sengaja dilakukan, sehingga kemudian petugas verifikasi dari KPU Kota Ygyakarta yang diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut mengapa bisa sampai terjadi dan mengangap KPU lah yang telah memasukkan nama mereka dalam daftar keanggotaan parpol dengan sengaja, setelah dijelaskan bahwa yang memsukkan nama mereka adalah partai-partai yang bersangkutan baru lah mereka marahnya ke partai, lebih jauh lagi beliau mengatakan tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan komplain secara hukum sehingga adanya panicment kepada parpol, ketika parpol secara sepihak mengklaim seseorang sebagai anggota dari partainya, tetapi orang yang diklaim tidak bisa tidak bisa melakukan komplain itu yang masih menjadi persoalan.²⁹

²⁹ Sesuai hasil wawancara dengan bapak Titok Haryanto, Mantan Anggota KPU Kota Yogyakarta Periode 2008-2013 di LSM IRE Yogyakarta pada 19 februari 2014.

d) Kewajiban KPU Kota Yogyakarta Dalam Tahapan Proses Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

Berbicara tentang kewajiban KPU Kota Yogyakarta selama pelaksanaan verifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu, hal ini sedikit banyak memang berkaitan dengan uraian sebelumnya pada dasarnya “Peran, Tugas, dan Kewajiban” memang kerap kali disamakan maknanya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa bahwa logika penulis menyertakan Kewajiban KPU Kota Yogyakarta atas dasar perbedaan makna yang pada hakikatnya memang tidak terlalu jauh berbeda, yang membedakan hanya sifat yang melekat pada tugas yang diemban pihak KPU Kota Yogyakarta. Misalkan saja dari rangkaian tugas KPU Kota yang tersirat dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh pihak KPU Kota.

Adapun kewajiban-kewajiban KPU Kota Yogyakarta dalam tahanan proses verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 akan coba penulis paparkan dalam uraian berikut ini.

a. Memberlakukan parpol secara adil dan setara;

Bentuk manifestasi dari kewajiban memberlakukan parpol secara adil dan setara dalam proses verifikasi adalah sudah termasuk pada apa yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni perlakuan adil dan setara dalam proses tahapan verifikasi tanpa memihak atau melakukan tebangpilih terhadap parpol yang akan dilakukan verifikasi, KPU Kota Yogyakarta

verifikasi dalam mengambil keputusan. Jika parpol memang tidak bisa memenuhi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditentukan KPU Kota Yogyakarta harus tegas mengambil keputusan bahwa parpol yang bersangkutan memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Hal demikian terlihat dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan untuk melakukan tahapan verifikasi kesemua parpol yang akan mengikuti pemilu baik secara administrasi dan faktual dan berlaku juga terhap parpol yang sudah memenuhi Parlementary Treshold (PT) pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa DKPP KPU ingin memberlakukan parpol yang akan mengikuti pemilu secara adil dan setara.

b. Menyampaikan hasil verifikasi

Merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak lagi oleh KPU Kota Yogyakarta untuk menyampaikan hasil dari setiap pelaksanaan verifikasi baik administrasi maupun faktual kepada seluruh parpol yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk menyampaikan setiap hasil dari tahapan verifikasi yang telah dilakukan, KPU Kota Yogyakarta menyampaikannya dengan cara melakukan rapat pleno terbuka penyampaian hasil dari berita acara rekapitulasi verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dan selanjutnya KPU Kota Yogyakarta mengirimkan surat undangan kepada parpol untuk

e) Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu di Kota Yogyakarta.

Faktor Pendukung :

1. Jangkauan wilayah

Dari sisi geografis wilayah Kota Yogyakarta hanya 32 km persegi luas wilayahnya, dilihat dari sisi jangkauan transportasi dan mibilitas hampir semua bisa didatangi, dikarnakan letak Kota Yogyakarta berada ditengah-tengah Provinsi DIY, sangat memudahkan tim-tim verifikasi dari KPU Kota Yogyakarta untuk menjangku dan mencari alamat kantor parpol dan alamat anggota dan pengurus parpol untuk melihat dan mencocokkan kebenaran bukti berkas-berkas administrasi keanggotaan dan pengurus yang ada di KPU Kota Yogyakarta dengan kebenaran yang ada dilapangan untuk bisa dinilai sudah memenuhi apa belum memenuhi persyaratan yang ada diwilayah Kota Yogyakarta seperti jumlah dukungan anggota minimal 406 anggota karna diambil sepuluh persen dari jumlah penduduk kota 406.010 jiwa, kemudian persentase 30% keterwakilan pengurus perempuan, selanjutnya kebenaran keberadaan pengurus yang meliputi, ketua, sekertaris, dan bendahara parpol yang dibuktikan dengan KTP dan KTA parpol yang masih berlaku, dan yang terakhir terkait dengan keabsahaan kepemilikan kantor atau sekretariat mengenai kepastian hukum status kantor tersebut dan masa tenggang waktu berlakunya kantor

b. Peran serta petugas KPU Kota Yogyakarta

Tidak dipungkiri lagi bahwa kinerja ataupun peran serta dari petugas KPU dalam melakukan verifikasi dilapangan sangat besar, terkait dengan kinerjanya dilapangan pada saat melakukan verifikasi faktual dalam membantu mencari alamat kantor, maupun alamat pengurus dan anggota parpol yang secara prakteknya dilapangan semuanya tidak mudah dilaksanakan, karna tidak semuanya pada saat didatangi oleh petugas KPU Kota Yogyakarta kealamatnya pasti ada ditempat, belum lagi alamat yang sudah pindah dan segala macamnya hal-hal demikian yang membuat petugas verifikasi KPU Kota Yogyakarta harus bolak balik mencari yang bersangkutan untuk bisa dilakukan pencocokan data.

Faktor Kendala :

1. Dalam verifikasi administrasi

Berkaitan dengan persyaratan administrasi berupa kepengurusan, dan kantor, ada beberapa parpol yang infrastrukturnya belum siap sehingga KPU Kota Yogyakarta kesulitan menemukan alamat kantor, selanjutnya juga ada perubahan kepengurusan yang begitu cepat sehingga KPU Kota Yogyakarta harus menunggu diterbitkannya SK kepengurusan yang baru terlebih dahulu sesuai perubahan-perubahan yang terjadi dipartai tersebut, namun secara umum KPU Kota Yogyakarta tidak menemukan kesulitan-kesulitan yang cukup signifikan karna semua bisa terverifikasi secara faktual baik berupa persyaratan administrasi berkaitan

bisa diverifikasi kemudian hasil dari verifikasi tersebut disampaikan kepada seluruh parpol agar mereka tau apa saja yang masih menjadi kekurangan yang menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat.³⁰

2. Dalam verifikasi faktual

Berdasarkan keterangan hasil verifikasi faktual untuk wilayah Kota Yogyakarta tidak ada sesuatu hambatan yang cukup signifikan terkait pelaksanaan verifikasi faktual dilapangan, namun menyisakan suatu persoalan tetapi bukan sebuah persoalan karna KPU Kota sudah selsai sebenarnya, ketika KPU Kota melakukan verifikasi terhadap salah satu Parpol KPU Kota dilaporkan kepada Panwaslu dalam kajian Panwaslu KPU Kota tidak ada melakukan kesalahan sudah sesuai dengan prosedur dan kemudian masih berlanjut partai yang bersangkutan melanjutkan melaporkan ketahap PTTUN mereka juga kalah, persoalannya itu yang membuat energi KPU Kota Yogyakarta terkuras dan itu menjadi dinamika saja karna Parpol tersebut ingin jadi peserta Pemilu namun gagal tetapi ada ruang atau kanal untuk melakukan gugatan mereka lakukan dan KPU Kota menghormati mereka silakan saja melakukan gugatan.

Kemudian yang menjadi persoalan lain adalah ketika kami datangi orang itu tidak ada, yang menyebabkan kami harus balik lagi menunggu sampai kami bisa ketemu dengan orang tersebut dan itu yang menjadi kendala, atau kami temui, kami datangi rumahnya orang tersebut sedang

³⁰ Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Yogyakarta, Bpk Wawan Budiyanto, Sag. Di sekretariat KPU Kota Yogyakarta 24 Januari 2014.

berada dirumah sakit, yang seperti itu kemudian yang menjadi kendala didalam proses verifikasi.³¹

³¹ Sesuai hasil wawancara dengan bapak Titok Haryanto, Mantan Anggota KPU Kota Yogyakarta Periode 2008-2013 di LSM IRE Yogyakarta pada 19 februari 2014.